

## **BAB I** **(PENDAHULUAN)**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam sistem demokrasi Indonesia. Pengaturan mengenai Pilkada secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi dasar hukum penting dalam penguatan demokrasi lokal pasca reformasi. Undang-undang ini menegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara demokratis sebagai perwujudan kedaulatan rakyat di tingkat daerah.

Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Pilkada diposisikan sebagai mekanisme politik yang memberikan hak penuh kepada masyarakat daerah untuk menentukan pemimpin pemerintahannya secara langsung, tanpa perantara lembaga perwakilan. Dengan demikian, Pilkada menjadi instrumen utama partisipasi politik rakyat dalam sistem pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memandang Pilkada tidak hanya sebagai proses teknis pemilihan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan legitimasi politik kepala daerah. Kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada memperoleh mandat langsung dari rakyat, sehingga memiliki legitimasi yang kuat untuk menjalankan kewenangan pemerintahan daerah. Mandat tersebut sekaligus menempatkan kepala daerah dalam posisi yang bertanggung jawab secara politik kepada masyarakat pemilihnya. Dalam perspektif demokrasi lokal, Pilkada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas dan kontrol politik.

Melalui Pilkada, masyarakat tidak hanya memilih pemimpin baru, tetapi juga mengevaluasi kinerja pemerintahan sebelumnya dan peran partai politik yang mengusung kandidat. Oleh karena itu, Pilkada menjadi arena kompetisi politik yang melibatkan partai politik, kandidat, serta pemilih dalam konteks dinamika sosial dan politik daerah. Selain itu, pelaksanaan Pilkada menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mencerminkan penguatan otonomi daerah. Pilkada memberikan ruang bagi daerah untuk menentukan kepemimpinan politiknya sendiri sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat setempat. Dalam konteks ini, Pilkada tidak hanya berdimensi politik, tetapi juga berdimensi administratif dan pembangunan, karena hasil Pilkada akan sangat memengaruhi arah kebijakan dan pembangunan daerah.

Dalam masyarakat perkotaan yang dinamis seperti Kota Depok, pelaksanaan Pilkada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi arena yang memperlihatkan interaksi antara perilaku pemilih, strategi politik partai, dan dinamika sosial-politik lokal. Pemilih dengan latar belakang sosial yang beragam dan tingkat rasionalitas yang semakin tinggi menjadikan Pilkada sebagai ruang evaluasi kritis terhadap partai politik dan kandidat yang berkompetisi. Oleh karena itu, Pilkada dalam penelitian ini diposisikan sebagai konteks utama untuk menganalisis kekalahan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Depok pada Pilkada 2024, dengan melihat bagaimana prinsip-prinsip demokratis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berinteraksi dengan realitas politik lokal.

Partai politik merupakan wadah ataupun wahana bagi warga negara untuk mengutarakan atau menyampaikan haknya dalam berpendapat, berkumpul dan berserikat sebagai hak asasi manusia sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat [3]. Sedangkan fungsi partai politik sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun

2011 tentang partai politik, antara lain adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti, partai politik memiliki peranan dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat untuk dapat selalu menjadikan konstitusi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Pemilihan kepala daerah merupakan arena strategis dalam kontestasi demokrasi lokal karena menjadi ruang kompetisi antar-aktor politik untuk merebut legitimasi masyarakat serta memengaruhi arah kebijakan publik (Surbakti, 1999). Dalam konteks Jawa Barat, khususnya Kota Depok, dinamika pemilihan kepala daerah memperlihatkan perubahan preferensi politik masyarakat yang semakin kompleks dan tidak lagi dapat dijelaskan hanya melalui loyalitas ideologis ataupun kedekatan emosional dengan partai politik. Perubahan ini selaras dengan perkembangan studi perilaku pemilih kontemporer yang menempatkan individu sebagai aktor utama yang mengambil keputusan berdasarkan interaksi faktor sosiologis, psikologis, dan rasional (Sons. & Berelson, 1954). Sejak diberlakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung, peran partai politik menjadi sangat strategis. Partai tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan politik bagi calon kepala daerah, tetapi juga sebagai institusi yang bertanggung jawab membangun komunikasi politik, menyusun program, serta memobilisasi dukungan pemilih. Oleh karena itu, hasil Pilkada sering dijadikan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan partai politik dalam membaca dinamika pemilih dan merumuskan strategi politik yang efektif (Surbakti)

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah strategis dalam peta politik nasional dan lokal. Dengan jumlah penduduk dan pemilih yang besar serta karakter sosial yang heterogen, Jawa Barat sering menjadi barometer dinamika politik Indonesia. Di dalam konteks Jawa Barat, Kota Depok memiliki posisi yang unik dan menarik untuk dikaji. Secara historis, Depok dikenal sebagai wilayah

dengan dominasi politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam beberapa periode pemilihan, PKS mampu menempatkan kadernya dalam posisi strategis dan membangun citra sebagai partai yang kuat di tingkat lokal. Pada pemilihan kepala daerah (pilkada), dinamika pemilih serta transformasi struktur sosial dan preferensi politik masyarakat menjadi variabel penting yang bisa mengubah peta dukungan partai-partai tradisional. Dalam kasus wilayah urban seperti Kota Depok — bagian dari Jawa Barat — perubahan sosial, demografi, dan karakteristik pemilih (misalnya generasi muda, urbanisasi, meningkatnya kelas menengah) bisa mempengaruhi loyalitas terhadap partai berbasis ideologis/keagamaan seperti PKS.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lahir dari gerakan Tarbiyah dari beberapa kampus di Indonesia. Gerakan Tarbiyah sendiri awalnya lebih berfokus sebagai gerakan dakwah yang muncul di awal 1980-an di Era Orde Baru. Gerakan Tarbiyah bisa difahami sebagai alternatif dari berbagai gerakan Islam. Untuk memahami di mana letak PKS dalam peta gerakan Islam lain maka setting politik saat itu perlu dicermati. Di sini perlu diingat bahwa penguasa Orde Baru melakukan represi hambatan terhadap aktivitas Islam politik. Islam politik adalah kecenderungan sebagian muslim yang aktif di sektor politik dengan membawa aspirasi agama Islam. Reformasi pasca otoritarisme Orde Baru, telah menghidupkan kembali demokrasi. Pertumbuhan partai politik pada masa itu tidak terhindarkan lagi, sebab partai politik merupakan pilar dari demokrasi yang ada di dalam suatu negara modern. Ada beberapa partai yang berdiri setelah Orde Baru, diantaranya Partai Keadilan (Jurdi, 2008). Hal itu terbukti pada pemilu 1999 telah munculah 48 partai politik, termasuk di dalamnya ada beberapa partai Islam. Situasi ini memengaruhi kembali aktif dalam dunia politik dengan terjun langsung untuk memenangkan partai tertentu (Sunanto, 2005).

Kalangan mahasiswa dikampus juga mendirikan partai politik, yaitu PK yang didirikan pada tanggal 09 Agustus 1998 di Jakarta, di aula Masjid al-Azhar Kemayoran Baru. PK merupakan hasil dari gerakan dakwah di kampus yang dilakukan oleh mahasiswa Islam di Indonesia. Lahirnya Partai Keadilan Sejahtera tidak lepas dari peranan penting Partai Keadilan. Pernyataan ini bukan tanpa bukti,

dapat kita amati di mana pada pemilu 1999, Partai Keadilan menduduki peringkat ke tujuh diantara 48 partai politik peserta pemilu. Akan tetapi total tersebut belum mencukupi untuk mencapai aturan electoral threshold, sehingga tidak bisa mengikuti pemilu 2004 kecuali berganti nama dan lambang. Karena kegagalan tersebut Partai Keadilan bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Dalam waktu relatif singkat partai ini berkembang pesat, terutama pertumbuhan kader-kadernya yang selalu dibimbing dengan cara tarbiyah. Keputusan pimpinan tarbiyah menuju partai politik merupakan sikap keberanian dan komitmen yang tinggi, karena dari keputusan tersebut penuh resiko.

Dalam hal ini jika dilihat dari ormas yang lain yang tidak berani untuk aktivis dalam partai politik, seperti HTI, MMI dan FPI yang cenderung tidak ikut serta dalam sistem partai politik, mereka tidak mau ikut serta dengan alasan demokrasi merupakan produk barat. Karena keberaniannya ini sekarang menjadi salah satu partai besar di Indonesia dan mendapatkan suara yang cukup banyak di pileg diberbagai Kota atau Kabupaten. Perkembangannya diberbagai wilayah

Table 1 Hasil Suara Pason Yang diusung Oleh PKS Dalam Pemilihan Walikota Depok  
Dari Tahun 2005 - 2024

TAHUN PILKADA	PARTAI PENGUSUNG	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	PRESENTASE SUARA	SATUS KEMENANGAN
2005	PKS	Nur Mahmudi Ismail -Yuyun Wirasaputra	232.610	43,90%	Menang
2010	PKS, PAN PARTAI PELOPOR, PARTAI REPUBLIK	Nur Mahmudi Ismail - Mohammad Idris	227.744	61,87%	Menang

2015	PKS, GERINDRA, DEMOKRAT,PBB	Mohammad Idris dan Pradi Supriatna	411.367	61,91%	Menang
2020	PKS, DEMOKRAT & PPP	Mohammad Idris-Imam Budi Hartono	415.657	55,45%	Menang
2024	PKS & GOLKAR	Imam Budi Hartono - Ririn Farabi Arafiq	396.863	46,76%	Kalah

(Sumber :Data diolah penulis melalui laman <https://kota-depok.kpu.go.id/page/read/hasil-pemilihan-di-kota-depok>)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang selama dua dekade dikenal sebagai salah satu kekuatan politik dominan di Depok, mengalami kemunduran elektoral pada Pilkada 2024. Padahal, Depok secara historis merupakan basis penting bagi PKS, baik secara ideologis maupun struktural (Firdaus, 2020). Kekalahan ini menandai terjadinya perubahan signifikan dalam perilaku pemilih yang tidak bisa dilepaskan dari transformasi sosial masyarakat Jawa Barat, urbanisasi yang pesat, serta meningkatnya heterogenitas demografis di kawasan perkotaan seperti Depok (Irawan, 2021).

Kondisi tersebut memperkuat relevansi pendekatan sosiologis dalam menjelaskan melemahnya ikatan sosial-keagamaan yang sebelumnya menjadi modal elektoral PKS, sebagaimana digambarkan dalam studi klasik Columbia School yang menekankan pengaruh kelompok sosial sebagai determinan utama pilihan politik (Lazarsfeld, 1944). Dominasi PKS di Kota Depok tidak terlepas dari basis ideologis yang relatif solid, jaringan kader yang terorganisir, serta kedekatan partai dengan segmen pemilih tertentu, khususnya kelompok masyarakat urban religius. Kondisi ini menjadikan Depok sering disebut sebagai salah satu basis

elektoral utama PKS di Jawa Barat. Dalam kajian politik Islam di Indonesia, PKS kerap diposisikan sebagai partai dengan struktur kaderisasi yang kuat dan konsistensi ideologis yang relatif terjaga dibandingkan partai lain.

Namun demikian, pada Pilkada 2024, PKS justru mengalami kekalahan di Kota Depok. Kekalahan ini menjadi fenomena politik yang signifikan karena terjadi di wilayah yang selama ini dianggap sebagai “basis aman” partai. Dalam perspektif teori partai politik, kekalahan di basis tradisional mengindikasikan adanya persoalan serius, baik yang bersumber dari internal partai maupun dari perubahan eksternal yang memengaruhi perilaku pemilih (Katz, 2006). Kekalahan PKS juga terkait erat dengan kegagalan dalam mengelola strategi politik (Firmanzah). menegaskan bahwa segmentasi pemilih, penentuan sasaran kampanye, dan positioning partai harus dikelola secara adaptif terhadap perubahan sosial. Namun PKS tampak tidak memetakan ulang segmentasi pemilih secara akurat, terutama dalam menghadapi generasi muda dan kelas menengah pragmatis yang jumlahnya terus meningkat. Dalam aspek targeting, PKS terlalu bergantung pada basis tradisional dan belum mengembangkan strategi menysasar segmen baru. Sementara itu, pada aspek positioning, citra PKS sebagai partai bersih dan religius terganggu oleh isu-isu politik nasional, sehingga tidak lagi menjadi diferensiasi yang kuat di mata pemilih Depok.

Perubahan perilaku pemilih merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menjelaskan fenomena tersebut. Perilaku pemilih tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai variabel. Pendekatan sosiologis memandang bahwa pilihan politik individu dipengaruhi oleh latar belakang sosial seperti agama, pendidikan, kelas sosial, dan lingkungan komunitas (Almond & Verba, 1963). Dalam konteks masyarakat urban seperti Depok, perubahan struktur sosial dan meningkatnya mobilitas sosial berpotensi menggeser orientasi politik pemilih. Selain itu, pendekatan psikologis menekankan pentingnya ikatan emosional dan identifikasi pemilih terhadap partai atau kandidat tertentu. Loyalitas partisan yang sebelumnya kuat dapat melemah apabila pemilih merasa

kecewa terhadap kinerja partai atau tidak lagi memiliki kedekatan emosional dengan figur yang diusung (Campbell, E., Miller, & Stokes, 1960) Kondisi ini menjadi relevan dalam melihat apakah PKS masih memiliki ikatan psikologis yang kuat dengan pemilihnya di Depok pada Pilkada 2024. Sementara itu, pendekatan rasional melihat pemilih sebagai aktor yang mempertimbangkan keuntungan dan kerugian secara rasional sebelum menentukan pilihan politik. Pemilih cenderung mengevaluasi kinerja pemerintahan sebelumnya, program yang ditawarkan, serta kapasitas kandidat dalam menjawab permasalahan publik (Downs, An economic theory of democracy. Harper & Row, 1957).

Perilaku pemilih masyarakat Kota Depok pada Pemilihan walikota 2020 dipengaruhi oleh beberapa variabel dalam memberikan pilihannya atau suaranya pada pemilihan walikota. Variabel-variabel tersebut yakni variabel agama, variabel etnis, variabel identifikasi partai, variabel kualitas personal calon, variabel track record personal calon, variabel track record partai pengusung dan variabel perubahan kehidupan. Dari beberapa variabel tersebut variabel identifikasi partai dan variabel identifikasi kualitas personal calon berpengaruh sangat besar terhadap pilihan pada Pemilihan walikota 2020 Kota Depok, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Depok dalam menentukan pilihannya merupakan pemilih psikologis (M.AI-Hussen, 2020).

Dalam konteks ini, kekalahan PKS dapat dipahami sebagai refleksi dari penilaian rasional pemilih terhadap kinerja dan relevansi tawaran politik partai. Dengan demikian, kekalahan PKS di Depok pada Pilkada 2024 bukan hanya fenomena elektoral biasa, tetapi merupakan hasil interaksi kompleks antara perubahan perilaku pemilih dan lemahnya respons strategis partai dalam membaca dinamika sosial-politik lokal. Kajian mendalam terhadap faktor-faktor tersebut menjadi penting untuk memahami transformasi politik di Jawa Barat serta untuk menilai kemampuan partai politik dalam beradaptasi terhadap perubahan perilaku pemilih di wilayah perkotaan yang dinamis. Dalam konteks Pilkada Depok 2024, penting untuk menelaah apakah strategi politik PKS masih relevan dengan karakter

pemilih yang terus berubah. Dinamika politik lokal, munculnya kandidat pesaing dengan pendekatan yang lebih adaptif, serta isu-isu lokal yang berkembang dapat memengaruhi efektivitas strategi PKS. Oleh karena itu, kekalahan PKS tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor tunggal, melainkan harus dipahami sebagai hasil dari interaksi kompleks antara perilaku pemilih, strategi politik partai, serta konteks sosial-politik lokal.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Alexander R. Arifianto (2024) yang mengkaji kemunduran elektoral PKS dalam pemilu daerah di Indonesia, dengan fokus pada dinamika pragmatisme politik yang berdampak pada melemahnya ikatan dengan konstituen inti. Berangkat dari isu tersebut, penelitian skripsi ini secara khusus menyoroti aspek rekrutmen politik partai melalui organisasi sayap, dengan membandingkan strategi rekrutmen Tidar dan PKS Muda Kota Depok pada periode 2021–2025. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perbandingan (komparatif) dan bersifat deskriptif, dengan kerangka teori Partai Politik dari Miriam Budiardjo serta Teori Rekrutmen Politik dari Ramlan Surbakti.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam pola rekrutmen kedua organisasi sayap partai tersebut. Tidar Kota Depok cenderung menjalankan strategi rekrutmen secara informal melalui pelaksanaan program kerja, dengan pemanfaatan media sosial yang relatif terbatas, serta menghadapi kendala logistik dalam menjangkau wilayah tertentu. Sebaliknya, PKS Muda Kota Depok menerapkan pola rekrutmen yang lebih terarah, terstruktur, dan aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana mobilisasi serta perekrutan kader muda. Meskipun demikian, PKS Muda juga menghadapi hambatan internal berupa keengganan sebagian anggota untuk terdaftar secara formal dalam struktur kepartaian. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas rekrutmen politik tidak hanya ditentukan oleh strategi yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dan respons kader terhadap proses institusionalisasi partai.

Fenomena kekalahan PKS di Kota Depok pada Pilkada 2024 juga sejalan dengan temuan penelitian Ariel (2024) yang menunjukkan bahwa partai-partai Islam, termasuk PKS, menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan

relevansi politiknya di tengah perubahan perilaku pemilih. PKS yang sebelumnya dikenal memiliki diferensiasi ideologis kuat dan citra sebagai partai bersih, dinilai semakin kehilangan daya tarik akibat meningkatnya rasionalitas dan pragmatisme pemilih, khususnya di kalangan pemilih muda dan kelas menengah urban. Kondisi ini menyebabkan basis elektoral tradisional PKS mengalami erosi dan tidak lagi mampu menjamin kemenangan elektoral di tingkat lokal (Ariel). Kota Depok sebagai wilayah urban dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi serta akses informasi yang luas menjadi ruang sosial yang subur bagi tumbuhnya pemilih rasional. Perubahan struktur sosial ini berdampak pada melemahnya loyalitas partisan yang selama ini menjadi kekuatan utama PKS. Basis pemilih tradisional yang sebelumnya solid tidak lagi bersifat homogen, karena sebagian pemilih mulai mengevaluasi pilihan politiknya berdasarkan isu kebijakan, kualitas kepemimpinan, serta kemampuan kandidat dalam menjawab persoalan lokal. Dalam konteks tersebut, kekalahan PKS di Depok dapat dipahami sebagai refleksi dari perubahan perilaku pemilih yang lebih luas sebagaimana dijelaskan oleh Ariel dalam jurnal Politik Profetik yang berjudul Dinamika dan tantangan Partai Keadilan Sejahtera dalam politik Indonesia kontemporer.

Selain faktor perubahan perilaku pemilih, dinamika politik nasional juga turut memengaruhi persepsi publik terhadap PKS di tingkat lokal. Isu-isu nasional yang melibatkan PKS berpotensi memengaruhi citra partai di mata pemilih daerah, sehingga positioning PKS sebagai partai Islam yang bersih dan konsisten tidak lagi sepenuhnya diterima tanpa kritik. Oleh karena itu, kekalahan PKS di Kota Depok pada Pilkada 2024 menjadi fenomena politik yang penting untuk dikaji secara mendalam guna memahami interaksi antara perilaku pemilih, strategi partai, dan konteks sosial-politik lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengangkat judul penelitian ini yang berjudul “ **Kekalahan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Di Wilayah Jawa Barat Pada Pilkada 2024 (Studi Kasus Wilayah Depok)** ”. Dengan menggunakan pendekatan teori perilaku pemilih dan konsep strategi politik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika politik lokal serta kontribusi ilmiah bagi kajian ilmu politik,

khususnya terkait kekalahan partai politik dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2024.

## 1.2 Rumusan Masalah

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang selama dua dekade dikenal sebagai kekuatan politik dominan di Kota Depok, mengalami kekalahan pada Pilkada 2024. Kekalahan ini menjadi fenomena penting karena terjadi di wilayah yang selama ini dianggap sebagai basis tradisional partai. Dalam kajian partai politik, kekalahan di basis menunjukkan adanya persoalan mendasar, baik yang berasal dari strategi internal partai maupun dari perubahan eksternal yang memengaruhi preferensi pemilih. Kegagalan dalam mengelola strategi politik secara adaptif, terutama dalam segmentasi pemilih, penentuan sasaran kampanye, dan positioning partai, turut berkontribusi terhadap menurunnya dukungan elektoral (Firmanzah, 2008).

Selain faktor strategi partai, perubahan perilaku pemilih dan dinamika politik yang lebih luas juga memengaruhi hasil Pilkada tersebut. Dalam konteks masyarakat urban seperti Depok, pemilih cenderung semakin rasional dan kritis, sehingga loyalitas partisan tidak lagi menjadi penentu utama pilihan politik. Di sisi lain, isu-isu politik nasional turut membentuk persepsi publik terhadap PKS di tingkat lokal, yang berdampak pada melemahnya citra dan daya tarik partai. Oleh karena itu, kekalahan PKS di Kota Depok pada Pilkada 2024 menjadi penting untuk dikaji guna memahami keterkaitan antara perilaku pemilih, strategi partai, dan konteks sosial-politik lokal.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kekalahan PKS di wilayah kota Depok pada Pilkada kota Depok tahun 2024?
2. Bagaimana perilaku pemilih (sosiologis, psikologis, dan rasional) memengaruhi pilihan politik masyarakat Depok pada Pilkada Kota Depok tahun 2024?
3. Bagaimana strategi marketing politik (segmentasi, targeting, dan positioning) PKS kota Depok dijalankan dalam Pilkada Kota Depok tahun 2024?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Depok dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok Tahun 2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh perilaku pemilih, yang meliputi pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional, terhadap pilihan politik masyarakat Kota Depok pada Pilkada Kota Depok Tahun 2024.
3. Untuk menganalisis strategi marketing politik yang dilakukan oleh PKS Kota Depok dalam Pilkada Kota Depok Tahun 2024, khususnya yang berkaitan dengan strategi segmentasi, targeting, dan positioning dalam upaya memperoleh dukungan pemilih.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan akan memiliki manfaat baik akademis maupun praktis :

##### A. Manfaat Akademis

Secara akademis penulisan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kekalahan PKS di wilayah kota Depok pada Pilkada 2024

##### B. Manfaat Praktis

Untuk Kedepanya, penulisan ini diharapkan bisa dijadikan rujukan untuk penelitian dan tulisan lainnya. Dan yang lebih utama bisa bermanfaat untuk khalayak umum

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi umumnya disesuaikan dengan bidang ilmu yang sedang digeluti. Secara keseluruhan, tujuan dari sistematika ini adalah untuk mempermudah peneliti dalam menyusun skripsi secara terstruktur, sehingga dapat menghasilkan deskripsi data yang jelas dan mendetail tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. Sistematika penulisan skripsi berfungsi sebagai kerangka yang mengatur penyusunan skripsi mulai dari bab pertama hingga bab terakhir.

### **BAB I            PENDAHULUAN:**

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, mencakup alasan peneliti memilih masalah tersebut, pentingnya masalah tersebut diteliti, serta pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut, baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, pertanyaan penelitian yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan sebagai panduan dalam penulisan skripsi.

### **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat studi penelitian yang mencakup kajian topik yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Bab ini juga mencakup daftar teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Selain itu, terdapat kerangka pikir penelitian yang menjelaskan alur pemikiran dalam pelaksanaan penelitian, dengan penegasan teori dan fakta dari kajian kepustakaan yang menjadi dasar penelitian.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN :**

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, mencakup alasan peneliti memilih masalah tersebut, pentingnya masalah tersebut diteliti, serta pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut, baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, pertanyaan penelitian yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan sebagai panduan dalam penulisan skripsi.

### **BAB IV GAMBARAN UMUM :**

Bab ini menyajikan terkait sejarah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Visi & Misi dan tujuan PKS yang diambil langsung dari AD/ART PKS tahun 2025, kemudian menjelaskan terkait jenjang keanggotaan atau jenjang kaderisasi PKS yang diambil langsung dari AD/ART PKS tahun 2025, dan penjelasan terkait PKS Kota Depok.

### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :**

Bab ini memuat studi penelitian yang mencakup kajian topik yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Bab ini juga mencakup daftar teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Selain itu, terdapat kerangka pikir penelitian yang menjelaskan alur pemikiran dalam

pelaksanaan penelitian, dengan penegasan teori dan fakta dari kajian kepustakaan yang menjadi dasar penelitian.

## **BAB VI PENUTUP :**

Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan memberikan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya yang berminat mengkaji subjek serupa.

